

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil triangulasi sumber dengan empat informan kunci dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat serta hasil analisis terhadap delapan variabel utama pengelolaan pariwisata—yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengelolaan, pengawasan, pengembangan, dan keberlanjutan—diperoleh gambaran menyeluruh mengenai peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata Air Terjun Mbilulu. Secara umum, terdapat kesesuaian jawaban antar informan yang menunjukkan bahwa kebijakan, program, serta langkah-langkah pengelolaan telah diketahui secara kolektif dan dijalankan secara kelembagaan.

Pada aspek perencanaan, keberadaan dokumen resmi seperti RIPARDA dan RIPPARKAB telah menjadi acuan utama, meskipun partisipasi masyarakat dalam proses perumusannya masih terbatas. Pengorganisasian sudah melibatkan berbagai lintas sektor, namun belum didukung oleh struktur kelembagaan formal seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang fokus pada pengelolaan destinasi. Pelaksanaan program berjalan cukup aktif, termasuk pembangunan fisik, pelatihan SDM, serta promosi wisata, sebagian besar didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam hal pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan, namun belum berbasis sistem informasi modern, dan belum memiliki SOP tertulis yang terstandarisasi. Pengelolaan operasional, seperti penggunaan

sistem QRIS dan keterlibatan tenaga harian lepas (THL), menunjukkan inisiatif inovatif, meskipun integrasinya masih terbatas. Pengembangan pariwisata telah diarahkan pada pemberdayaan desa wisata dan kerja sama lintas sektor, termasuk keterlibatan pihak swasta seperti IFTA. Aspek keberlanjutan telah diperhatikan melalui kampanye kebersihan, program LISA, serta sosialisasi dampak lingkungan.

Temuan ini diperkuat oleh analisis faktor pendukung dan penghambat, yang menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Air Terjun Mbilulu didukung oleh kekuatan utama berupa daya tarik wisata yang unik, keterlibatan masyarakat lokal yang tinggi, program konservasi lingkungan yang konsisten, serta pengelolaan retribusi yang transparan. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah faktor penghambat serius, seperti kondisi jalan yang belum memadai, ketiadaan transportasi umum, promosi digital yang lemah, keterbatasan fasilitas umum, belum adanya petugas keamanan tetap, serta kompetensi SDM yang belum terstandarisasi secara profesional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata Air Terjun Mbilulu telah dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang nyata, namun masih menghadapi tantangan dalam hal standarisasi kelembagaan, penguatan digitalisasi, dan perluasan partisipasi masyarakat agar lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan pengelolaan pariwisata dengan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) khusus atau mendorong keberfungsian kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang terintegrasi dengan dinas terkait.
2. Peningkatan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, pembangunan toilet yang layak, dan jalur wisata yang aman perlu menjadi prioritas pemerintah kabupaten melalui program padat karya atau kolaborasi lintas sektor.
3. Digitalisasi promosi dan layanan wisata harus diperkuat melalui pelatihan pengelola lokal dalam bidang media sosial, konten kreatif, serta pemanfaatan platform digital resmi seperti Google Maps, website dinas, dan marketplace wisata.
4. Peningkatan kapasitas SDM wisata perlu dilakukan secara berkala melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi (pemandu wisata, pelayanan wisatawan), serta penguatan soft skills yang mendukung pelayanan prima.
5. Pemerintah dan masyarakat perlu menjalin kerja sama lebih erat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, tidak hanya melalui gotong royong, tetapi juga dengan pendekatan edukasi lingkungan, pelibatan anak muda, dan integrasi program konservasi ke dalam kurikulum desa wisata.
6. Transportasi umum menuju lokasi wisata perlu difasilitasi dengan menyusun jalur atau trayek lokal, atau mengembangkan model shuttle komunitas pada hari-hari tertentu untuk meningkatkan keterjangkauan lokasi oleh wisatawan.

7. Sistem pengawasan dan keamanan destinasi perlu dirancang secara lebih formal dengan melibatkan aparat desa atau petugas khusus, serta menetapkan prosedur penanganan insiden yang terstandar.



THE
Character Building
UNIVERSITY